

# PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN PERUBAHAN SOSIAL DI DESA SANUR KAJA, KOTAMADYA DENPASAR, PROPINSI BALI DENGAN TINJAUAN PSIKOLOGI

Ni Made Taganing Kurniati \*) dan Yeni D.S. Siagian\*)

## INTISARI

Daerah Sanur Kaja, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, merupakan daerah wisata utama di Propinsi Bali sejak pariwisata mulai dikembangkan di samping daerah Kuta dan Nusa Dua. Aktivitas pembangunan pariwisata, sebagaimana aktivitas pembangunan lainnya, mempunyai dampak positif maupun negatif. Pariwisata memiliki pengaruh yang besar dalam bidang sosial, budaya, ataupun perilaku terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan sosial yang terjadi di daerah wisata Sanur Kaja dan melihat kaitannya dengan perkembangan pariwisata. Sudut pandang psikologi dipergunakan dalam melakukan analisis data.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Penelitian dilakukan dengan cara rapid survey dengan menggali informasi secara cepat. Metode yang digunakan adalah metode observasi langsung, wawancara mendalam (*depth interview*), dan *focus group discussion*. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan profil. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dideskripsikan per indikator secara rinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sanur Kaja mulai melakukan adaptasi terhadap perkembangan pariwisata. Perubahan drastis terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan kebersamaan hanya mengalami beberapa penyesuaian.

---

\*) Mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Juara III LKWU (Lomba Karya Widya Utama) Bidang Sosial Tingkat Nasional Tahun 1995/1996. Pembimbing : Drs. Faturochman, M.A., dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

## PENDAHULUAN

Pembangunan industri pariwisata pada intinya merupakan suatu aktivitas menggali segala potensi pariwisata, baik yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan manusia yang kesemuanya memerlukan penanganan menyeluruh (Usman, 1991 dalam Nasikun, 1991). Menurut Kuntowijoyo (1991) dalam Nasikun (1991), industri pariwisata merupakan bagian dari industri kebudayaan yang me-libatkan seluruh masyarakat. Sering dijumpai perubahan perilaku dan budaya untuk menyambut wisatawan mancanegara pada masyarakat di daerah tujuan wisata, meskipun hal ini justru mengurangi aspek yang sebenarnya mendorong wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata. Pertimbangan ekonomi sering menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan pengembangan potensi wisata suatu daerah yang kemung-

kinan berdampak negatif secara sosial terhadap kehidupan keagamaan dalam suatu masyarakat (Soetrisno, 1991 dalam Nasikun 1991).

Secara global, pariwisata sebagai industri menempati suatu posisi sebagai industri terbesar di masa depan sehingga disebut sebagai *The Biggest Earner and Employer* (Windu Nuryanti, 1991). Di negarane-negara sedang berkembang pariwisata menduduki peringkat ketiga dalam jajaran sektor ekspor dalam hal perolehan devisa (Truit, 1990). Di Indonesia Pulau Bali merupakan daerah pariwisata yang penting. Namanya yang telah menginternasional sebagai daerah tujuan wisata menjadikannya sebagai ujung tombak upaya pemerintah untuk menjadikan pariwisata Indonesia sebagai salah satu penghasil devisa negara. Sadar dan bangga akan kekayaan dan keunikan budayanya pemerintah Indonesia menempatkan budaya Bali sebagai semacam komoditas yang merupakan salah

satu primadona ekonomi penghasil devisa (Wiryatnaya, 1992).

Dalam proses perkembangannya, pariwisata mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang sosial, budaya, ataupun perilaku terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah wisata (Soemardjan, 1974). Masyarakat dan kebudayaan Bali juga menerima pengaruh tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan sosial yang terjadi di daerah Sanur Kaja, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, dan melihat kaitannya dengan perkembangan pariwisata. Sudut pandang psikologi digunakan dalam melakukan analisis data. Daerah Sanur Kaja dipilih karena merupakan daerah wisata utama di Bali sejak pariwisata dikembangkan di samping daerah Kuta dan Nusa Dua.

Perubahan sosial di daerah wisata Sanur Kaja ini penting dikaji karena dampak sosial yang diakibatkannya bisa sangat luas dan tidak tertutup kemungkinan pola serupa akan berkembang di daerah lainnya yang sedang dikembangkan ataupun yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif sehingga materi penelitian ini menyangkut fakta-fakta yang terdapat di Desa Sanur Kaja, yang berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi setelah pariwisata berkembang. Menurut Singarimbun (1989), penelitian eksploratif bersifat terbuka dan masih mencari-cari.

Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan area yang akan diteliti. Secara administratif, Desa Sanur Kaja merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Sanur Lama, di samping Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh.

Desa Sanur Kaja dipilih karena merupakan cikal bakal Daerah Wisata Sanur. Pada awalnya, pemerintahan daerah Sanur dipusatkan di daerah yang sekarang dikenal sebagai Desa Sanur Kaja ini. Pada perkembangan selanjutnya, ketika jumlah penduduk semakin padat sehingga beberapa kelompok masyarakat diakui sebagai banjar, pada tahun 1980 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 7/Pem/II.a/2-57/1980 Tanggal 1 Maret 1980, pengelolaan wilayah dibagi ke dalam tiga desa, yaitu Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, dan daerah Sanur Kangin untuk kemudian ditetapkan sebagai desa/kelurahan definitif dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57

Tahun 1982. Dari segi adat, Desa Sanur Kaja termasuk ke dalam Desa. Adat Sanur, berbeda dengan Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh. Pariwisata di daerah Sanur Kaja pada mulanya dikembangkan dengan didirikannya Hotel Bali Beach pada tahun 1966 dan kini dikenal dengan nama Hotel Grand Bali Beach.

Desa Sanur Kaja terdiri atas sembilan banjar adat yang dibagi ke dalam delapan dusun atau banjar dinas. Dua banjar, yaitu Banjar Pekandelan dan Batanpoh ditentukan secara *purposive* sebagai subjek dalam penelitian ini karena kedua banjar ini merupakan banjar-banjar yang heterogen bila dilihat dari segi agama dan mata pencaharian penduduknya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan sosial yang terjadi di Desa Sanur Kaja digunakan *rapid survey* yang bercirikan penggalan informasi secara cepat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi langsung, wawancara mendalam (*depth interview*), dan *focus group discussion* (FGD).

Metode observasi langsung dilakukan dengan mengamati langsung objek yang hendak diteliti dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap apa yang diamati. Hasyim (1983 dalam Gorda, 1989) mengatakan bahwa observasi termasuk metode pengumpulan data yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam metode observasi ini kamera digunakan sebagai alat bantu.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap pejabat pemerintah terkait dan pakar bidang sosial. Wawancara mendalam tahap pertama dilakukan sebelum FGD dilaksanakan untuk mendapat pemahaman lebih jelas tentang Desa Sanur Kaja secara umum. Sedangkan wawancara mendalam tahap kedua dilakukan setelah FGD untuk memperoleh setelah FGD untuk memperoleh penjelasan yang lebih detail tentang beberapa topik yang dibahas dalam FGD. Alat bantu dalam wawancara ini adalah *tape recorder*.

Metode FGD dilakukan terhadap beberapa anggota masyarakat, sesepuh banjar, dan pejabat terkait sebagai subjek yang ditentukan dengan *purposive sampling*. Persyaratan pokok pemilihan subjek adalah penduduk asli yang telah berdomisili di Banjar Pekandelan dan Banjar Batanpoh dalam sepuluh tahun terakhir dan mengikuti perkembangan banjarnya masing-masing.

Metode FGD merupakan metode pengumpulan data sejenis wawancara mendalam yang dilakukan dalam kelompok. Beberapa subjek dilibatkan dalam diskusi mendalam yang topiknya telah ditetapkan dan jalan diskusi diarahkan oleh moderator. Topik-topik yang akan didiskusikan disiapkan dalam pedoman

diskusi dan hasil diskusi dicatat oleh notulis dan direkam dengan *tape recorder*.

Data yang diperoleh dari ketiga metode dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan profil. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dideskripsikan per indikator secara rinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-aspek yang disorot dalam penelitian ini mencakup aspek sosial budaya yang meliputi kegotongroyongan, organisasi sosial tradisional dan nontradisional, serta bidang seni seperti yang dikemukakan oleh Mantra dan Kutaneegara (1990) dan juga aspek ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian dan usaha-usaha penduduk baik formal maupun informal.

Semenjak berdirinya Hotel Grand Bali Beach pada tahun 1966, masyarakat Desa Sanur Kaja mulai melakukan adaptasi terhadap perkembangan pariwisata. Penyesuaian ini terjadi secara perlahan-lahan dan sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan-perubahan dari corak kehidupan asli. Dari aspek-aspek yang dilihat dalam penelitian ini, beberapa menunjukkan perubahan yang drastis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, dan sebagian, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mendasar seperti keagamaan dan kebersamaan, hanya mengalami penyesuaian.

Bentuk kegotongroyongan masyarakat yang dikenal adalah *masebahu* dan *maselisih*. *Masebahu* merupakan aktivitas gotong royong antarindividu dengan saling memberikan ternaknya masing-masing sehingga diperoleh sepasang ternak untuk menarik bajak yang akan dipergunakan bergantian oleh pemilik ternak masing-masing. Aktivitas *masebahu* akan berulang pada setiap musim tanam berikutnya. Adapun *maselisih* adalah jenis gotong royong dengan tukar-menukar tenaga dalam aktivitas pertanian atau kemasyarakatan, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berat dan memerlukan tenaga tambahan seperti mencangkul, menanam, atau menuai sehingga pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Kegotongroyongan dalam kedua bentuk tersebut telah pudar seiring dengan peralihan mata pencaharian ke sektor pariwisata. Hal ini terjadi karena bentuk kegotongroyongan tersebut tumbuh atas dasar kepentingan. Ketika kepentingan tidak ada lagi, kegotongroyongan turut lenyap. Di samping itu, meningkatnya tuntutan hidup atau materialisme turut mempengaruhi perubahan ini.

Perkembangan pariwisata dalam hal ini dapat dipandang turut berperan dalam meningkatkan akselerasi perubahan karena dengan berkembangnya

pariwisata, masyarakat mempunyai peluang untuk terjun pada sektor pekerjaan di luar pertanian. Namun masih terlalu dini untuk menganggap perkembangan pariwisata sebagai penyebab pokok perubahan karena di daerah yang bukan merupakan daerah wisata pun kegotongroyongan telah surut.

Hal yang sama terjadi pada kegotongroyongan yang disebut *ngrombo* di kalangan keluarga dan trah. Bentuk gotong royong ini berupa bantuan dari teman dan kerabat dekat pada saat perbaikan rumah, pagar, atau tempat ibadah. Dengan semakin berharganya waktu untuk mendapatkan uang, aktivitas ini mulai ditinggalkan. Namun perkembangan pariwisata dalam hal ini berperan sebatas sebagai akselerator perubahan.

Tidak demikian halnya kegotongroyongan di bidang kemasyarakatan. Kerja bakti, yaitu pengerahan tenaga masyarakat secara massal untuk membersihkan lingkungan, tidak lepuh, malahan semakin digiatkan oleh aparat desa terkait. Ini tidak lepas dari peranan kegiatan-kegiatan simultan, seperti lomba desa, yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai salah satu kriteria penilaian. Adanya sanksi berupa denda uang disepakati berdasarkan musyawarah desa untuk warga yang tidak mengikuti kerja bakti merupakan simbol ketidaksetujuan dan hukuman masyarakat. Dalam hal ini banjar mempunyai kekuatan yang disebut oleh O'Sears dkk. (1988) sebagai *coerced power* atau kekuatan untuk memaksa, dengan menunjukkan ketidaksetujuan dengan denda.

Kegotongroyongan dalam bidang religi dan kepercayaan pun masih terus dipertahankan. Anggota masyarakat tidak ada yang meninggalkan tradisi *ngoopin* dan *ngayah*, baik dalam upacara suka atau duka. Istilah *ngoopin* dipakai untuk aktivitas pada kasta yang s :tingkat, sedangkan *ngayah* untuk aktivitas pada kasta yang lebih tinggi. Ini terjadi karena adanya keterkaitan dengan keterikatan pada banjar adat atau desa adat sebagai kelompok sosial.

Bertahannya kegotongroyongan religi mengindikasikan bahwa banjar adat ataupun desa adat masih memiliki kohesifitas tinggi. Dalam banjar dikenal adanya tradisi *disepekan* atau dikucilkan, yaitu warga yang dianggap melanggar tidak dipedulikan sampai batas waktu tertentu. Jika hal ini terus berlanjut, maka keanggotaannya dalam banjar adat akan dicabut sehingga hak-hak sebagai anggota, seperti hak untuk mendapat ku-buran dan air suci atau tirta dari Pura Kahyangan Tiga Desa, otomatis hilang.

Di sisi lain, banjar dinas atau dusun pun masih mempunyai peranan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bukti adalah antusiasme masyarakat untuk mengikuti kerja bakti seperti yang dijelaskan di atas. Di samping itu, kegiatan-kegiatan

lain pun mendapat dukungan anggota, seperti perlombaan-perlombaan.

Organisasi subak, yaitu organisasi petani yang berfungsi mengatur irigasi dan memelihara bendung dan saluran air, dan sekaha-sekaha atau kelompok kepentingan dengan cakupan wilayah dan jumlah anggota yang lebih kecil, yang pernah menjamur di Desa Sanur Kaja sekarang telah menunjukkan kelesuan. Anggota-anggota subak sebagian besar berstatus pasif. Dan sekaha-sekaha bidang pertanian tidak dijumpai lagi. Hal ini terjadi karena bergesernya mata pencaharian penduduk ke bidang pariwisata.

Dalam seni tari terjadi adaptasi berupa pengklasifikasian tari atas dasar kesakralannya. Tari yang tergolong sakral tidak diperkenankan dipertontonkan kepada wisatawan untuk memperoleh bayaran. Inilah yang disebut oleh Albert Bandura (dalam Hergenhahn, 1988) sebagai *moral code* atau norma yang dipegang dan diikuti oleh masyarakat setempat. Perkembangan selanjutnya adalah adaptasi lanjut dengan diperbolehkannya pementasan imitasi dari beberapa jenis tari sakral. Dalam kasus ini telah terjadi perubahan *moral code* yang dipegang oleh masyarakat.

Timbul dan diinternalisasikannya *moral code* yang baru tersebut tidak lepas dari adanya penguat atau *reinforcement*. Dalam hal ini motif ekonomi merupakan penguat yang paling pokok. Perubahan *moral code* dipercepat dengan adanya pendapat bahwa diperbolehkannya pementasan imitasi tari sakral berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama penarinya. Jika taraf hidup meningkat, upacara keagamaan akan dapat diselenggarakan dengan lebih megah. Ini yang disebut oleh Albert Bandura (dalam Hergenhahn, 1988) sebagai justifikasi moral, yaitu alasan bahwa penyimpangan mempunyai tujuan lebih mulia.

Meskipun demikian, Noronha (1979, dalam Nasikun 1991) mengemukakan bahwa kreativitas dan kualitas karya seni ini tidak mengalami degenerasi karena masyarakat Bali masih mampu untuk membedakan antara karya seni yang ditujukan untuk kepentingan religius dan yang diproduksi untuk kepentingan pariwisata.

Perubahan lain, yaitu dalam seni arsitektur tradisional. Ketika arsitektur modern muncul, banyak masyarakat yang beralih dari arsitektur tradisional asli ke arsitektur modern. Namun saat ini ada kecenderungan untuk kembali ke arsitektur tradisional, dengan modernisasi di sana-sini. Ada satu hal yang tetap dipegang dalam ciri arsitektur saat ini. Bagaimanapun tipe rumah yang dimiliki, keberadaan *bale dangin* yang menjadi tempat *pemerajan* atau upacara keagamaan

dan *sanggah* sebagai tempat sembahyang selalu disertakan dalam bangunan masyarakat Hindu. Ini merupakan indikasi bahwa religiusitas masyarakat Sanur Kaja masih melekat kuat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan atau adaptasi terhadap perkembangan pariwisata telah berjalan di tengah masyarakat Sanur Kaja. Perubahan tersebut terjadi dalam bidang kemasyarakatan, seperti bentuk-bentuk kegotongroyongan, seni tari, seni patung, dan arsitektur tradisional. Mata pencaharian penduduk beralih dari bidang pertanian ke bidang yang terkait dengan pariwisata. Hal tersebut mempengaruhi keberadaan organisasi masyarakat seperti subak dan sekaha-sekaha. Dalam hal keagamaan dan kebersamaan dalam banjar adat, banjar desa, dan banjar dinas, tidak terjadi perubahan yang cukup berarti. Keberadaan banjar masih sangat kuat di tengah-tengah masyarakat.

Perlu diadakan suatu penelitian yang lebih komprehensif antardaerah wisata untuk mencari perbandingan perubahan sosial yang terjadi di daerah wisata yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gorda, I.G.N., 1989. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Praktis*, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar.
- Hergenhahn, B.R., 1988. *Introduction of Theories of Learning*, 3<sup>rd</sup>.ed., Prentice Hall, New Jersey.
- Mantra, I.B., Kutaneegara, P.M., 1980, Dampak industri pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di Ubud, *Populasi No. 2*.
- Nasikun, 1991. Dampak sosial-budaya pembangunan pariwisata. Degenerasi atau transformasi?, *Makalah Seminar Pusat Antar-Universitas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sears, O.D., Freedman, J.L., Peplau, L.A., 1988. *Psikologi Sosial*, Alih bahasa Michael Ardyanto, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soemardjan, S., 1974, Pariwisata dan kebudayaan, *Majalah Prisma Tahun III No. 4*.
- Truit, J.F., 1990. *International Business*, Kendall/ Hunt, Iowa.
- Windu Nuryanti, 1991. Perencanaan pembangunan pariwisata di Indonesia, *Makalah Seminar Pusat Antar-Universitas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wiratnaya, U, 1992. Kritik terhadap pariwisata, *Majalah Binadarma Tahun X, No. 38*.